



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
PENYELENGGARAAN
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPIP

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 2). Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi dalam bentuk Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Tingkatan ini menggambarkan kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern.

Dinas Pertanian dan Pangan sebagai penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kebumen mempunyai kewajiban dalam penyusunan SPIP tersebut, sebagai tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 2 Maret 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN,



Ir. TRI HARYONO
Pembinan Utama Muda

NIP. 19620111 198603 1 018

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Dasar Hukum	1
C.Maksud dan Tujuan	2
D.Ruang Lingkup	2
II. SEKILAS TENTANG SPIP	3
A.Pengertian	3
B.Tujuan SPIP.....	3
C.Unsur-Unsur SPIP	4
D.Pernyataan Tanggungjawab	5
III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	7
IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN	8
A.Pernyataan Tujuan	8
B.Risiko-Risiko	8
C.Kegiatan Pengendalian Terpasang	9
D.Kegiatan-Kegiatan Yang Masih Dibutuhkan	9
V. INFROMASI DAN KOMUNIKASI	12
VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	13
A.Pemantauan Berkelanjutan	13
B.Evaluasi Terpisah	13
C.Pelaksanaan Tindak Lanjut	13
D.Pemantauan Atas Pelaksanaan RTP	13
VII. PENUTUP	14
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem Pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien, maka diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

4. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Nomor 050/15/KEP/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 (terlampir).

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran, tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2020.

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggungjawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- a) Dikaitkan dengan Penilaian Risiko
- b) Disesuaikan dengan sifat khusus Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
- c) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan
- d) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dalam rangka penyalenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggungjawabnya, termasuk pemahamannya akan peran dan tanggungjawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*STATEMENT OF RESPONSIBILITIES*)

Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 (Pasal 56 ayat (4), dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian

yang dibuat dan dipantau setiap tahun. Rencana tindak pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Unsur lingkungan pengendalian merupakan Pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPIP. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern yang efektif di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

Pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen bertujuan untuk :

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2020 rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan.

B. Risiko – Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Risiko – risiko yang teridentifikasi tinggi sampai dengan sangat tinggi pada kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
 - b. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan;
 - c. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah.
2. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
 - a. Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya;
 - b. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan.
3. Bidang Tanaman Pangan
 - a. Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palwija.
4. Bidang Ketahanan Pangan
 - a. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
 - b. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa;
 - c. Kegiatan Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien;
 - d. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
 - e. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan.
5. Bidang Hortikultura dan Perkebunan
 - a. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman;

- b. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan;
 - c. Kegiatan Pengembangan Sentra Tanaman Hortikultura dan Buah-Buahan;
 - d. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- a. Kegiatan Pendataan Masalah Peternakan;
 - b. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular;
 - c. Fasilitasi Pendukung Penanganan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kemasvet);
 - d. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak;
 - e. Kegiatan Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak;
 - f. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan;
 - g. Kegiatan Fasilitasi Pendataan Peternakan;
 - h. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah;

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang sebagaimana kolom 10 “Pengendalian Yang Telah Ada” Form Register Risiko dalam Lampiran, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Pembentukan Kelompok Kerja/Tim;
- 2. Menyelenggarakan Rapat dan Koordinasi internal;
- 3. Melaksanakan Monitoring, evaluasi, atau survey;
- 4. Koordinasi dengan SKPD lain atau instansi terkait;
- 5. Melakukan Konsultasi;
- 6. Melakukan Sosialisasi.

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi

kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat

- Memaksimalkan aset yang masih dalam kondisi baik;
- Lebih mengintensifkan lagi koordinasi internal (Bidang, Seksi, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu) dan koordinasi eksternal (Instansi terkait).

2. Bidang Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan

- Melaksanakan updating data kebutuhan pupuk bersubsidi secara berkala;
- Menyusun data pemanfaatan alsintan untuk mengetahui sebaran, jenis dan kondisi alsintan;
- Melakukan koordinasi dengan PPL Kecamatan;
- Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur yang telah ada.

3. Bidang Tanaman Pangan

- Verifikasi usulan CPCL oleh petugas penyuluh di tingkat kecamatan;
- Penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas;
- Mengupdate perkembangan data iklim dan disertai mencari data potensi sumber air alternatif;
- Peningkatan koordinasi dengan petugas penyuluh lapangan dan petugas dari instansi terkait (eksternal) dilapangan.

4. Bidang Ketahanan Pangan

- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;
- Penunjukan Tim Penerima hasil pekerjaan yang Profesional;
- Monitoring kemajuan pekerjaan;
- Peremajaan cadangan pangan;
- Rapat koordinasi Tim SKPG secara periodik;
- Pemeriksaan stok cadangan pangan dengan tepat dan akuntabel;
- Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang dirasionalisasikan; Pengawasan/ pemantauan dilakukan secara periodik Kegiatan;
- Sosialisasi dan pelatihan/ pembinaan secara terus menerus;

5. Bidang Hortikultura dan Perkebunan

- Penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas;

- Mengupdate perkembangan data iklim dan koordinasi dengan BMKG;
 - Kerjasama dengan Balai benih dan Balai Proteksi dalam pengadaan dan perlindungan perbenih;
 - Mengadakan SL GAP hortikultura secara terus menerus;
 - Sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus;
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Menginformasikan kpd peternak untuk swadaya pemeriksaan lab sapi bibit;
 - Memberikan KIE kepada peternak agar swadaya dalam pembiayaan layanan kesehatan hewan terutama kasus yang penting;
 - Hanya pelayanan pasif dan Jalin komunikasi lebih intens dengan petugas agar meneruskan ke kader keswan;
 - Memastikan jagal tetap mau memotong di RPH;
 - Memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai fungsinya;
 - Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil rasionalisasi anggaran; Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam kolom 15 “Rencana Pengendalian” form Regiter Risiko.

V.INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. ***Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun*** sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi komunikasi langsung dengan konsultasi dan koordinasi, melalui surat (cetak dan elektronik), telepon, faksimil, dan Sosial Media (WhatsApp).

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi meliputi:

A. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing Bagian pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi: Koordinasi, Konsultasi, Supervisi dan Asistensi.

B. Evaluasi

Evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis dilaksanakan pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

C. Pelaksanaan Tindak Lanjut.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/ evaluasi/ revidi dari auditor eksternal maupun internal, maka Sekretariat, Bidang, Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu melaksanakan tindak lanjutnya.

D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau.

VII. PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Kebumen, 2 Maret 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN,



Ir. TRI HARYONO
Pemimpin Utama Muda

NIP. 19620111 198603 1 018

Lampiran 1
SK PEMBENTUKAN SATGAS SPIP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Lampiran 2

**REKAPITULASI ANALISIS RESIKO
KEGIATAN TAHUN 2020
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan Ronggowarsito Nomor 298 Pejagoan -Kebumen
Telepon/Faksimile (0287)
Kode Pos 54361

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 050/15/KEP/I/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka dalam proses pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 11)
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penilaian Resiko Pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 35)
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 40)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. menyusun berbagai instrumen yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- b. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
 2. membantu Ketua Satuan Tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 3. membantu ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. membantu Ketua Satuan Tugas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Memberikan masukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

KETIGA: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 050/15/KEP/I/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Pembina
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Ketua
3.	Kasubbag. Perencanaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota
6.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota
7.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota
8.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubbag Keuangan	Anggota
10	Kasi Perbenihan dan Perlindungan pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
11.	Kasi Produksi pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
12	Kasi Pengolahan dan Pemasaran pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
13	Kasi Lahan dan Irigasi pada Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	Anggota
14.	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian pada Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	Anggota
15.	Kasi Penyuluhan dan Pembiayaan pada Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	Anggota
16.	Kasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
17.	Kasi Pengolahan, Pemasaran dan Pakan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
18.	Kasi Perbibitan dan Produksi Ternak pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
21.	Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan pada Bidang	Anggota

	Ketahanan Pangan	
NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
22.	Kasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
23.	Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
24.	Kasi Perbenihan dan Perlindungan pada Bidang Tanaman Pangan	Anggota
25.	Kasi Produksi pada Bidang Tanaman Pangan	Anggota
26.	Kasi Pengolahan dan Pemasaran pada Bidang Tanaman Pangan	Anggota

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN



REKAPITULASI ANALISIS RESIKO
KEGIATAN TAHUN 2020
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	R 1	Verifikasi tidak dilakukan dengan teliti	Rendahnya integritas petugas	C	Pengadaan materai	2	1	1	kecil	Hindari resiko	singkirkan sebabnya	2	1	2	kecil	PPTK	12 Bulan
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	R 1	Verifikasi tidak dilakukan dengan teliti	Tidak terbayarnya listrik, air dan telepon	C	Penghematan Energi	1	2	2	kecil	Hindari resiko	singkirkan sebabnya	2	1	3	kecil	PPTK	12 Bulan
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak cermat dalam membuat jadwal pelaksanaan	R 1	Tidak terlaksanya jasa servis dan penggantian suku cadang, BBM, Pajak kendaraan dan penggantian STNK	Terlambat dalam pelaksanaan jasa servis dan penggantian suku cadang, BBM, Pajak kendaraan dan penggantian STNK	C	Pengaturan jadwal yang efektif	1	2	2	kecil	Pembuatan jadwal yang akomodatif	Perbaiki Pengkondisian jadwal	2	1	3	kecil	PPTK	12 Bulan
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya jasa administrasi keuangan mendukung kelancaran administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	R 1	Verifikasi tidak dilakukan dengan teliti	Tidak terbayarnya Honorarium pegawai	C	pembinaan sumberdaya manusia	2	2	2	kecil	pembahasan akses atas sumberdaya dan pencatatannya	singkirkan sebabnya	1	2	2	kecil	PPTK	12 Bulan

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya jasa kebersihan mendukung kelancaran pelayanan perkantoran	Terpenuhi kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	R 1	koordinasi antar bagian/bidang kurang baik	tidak terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor	C	Akuntabilitas terhadap sumberdaya dan pencatatannya	2	1	2	kecil	pembahasan akses atas sumberdaya dan pencatatannya	singkirkan sebabnya	2	1	2	kecil	PPTK	12 Bulan
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhi kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Usulan perbaikan yang terlambat	R 1	Terlambat dalam melaksanakan perbaikan	terlambat dalam pengajuan usulan perbaikan	C	Himbauan untuk pengajuan usulan perbaikan sedini mungkin	2	1	2	kecil	Pelaporan usulan perbaikan segera mungkin	usulan perbaikan segera di akomodir	2	1	2	kecil	PPTK	12 Bulan
7	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhi kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	spesikasi yang kurang tepat yang tidak sesuai	R 1	alat tulis kantor kurang sesuai dengan kebutuhan	kurang cermat dalam membuat rencana kebutuhan	C	Pembuatan rencana kebutuhan yang akurat	2	1	2	kecil	Tindak lanjut dari hasil evaluasi rencana kebutuhan dan pelaksanaan sebelumnya	Pembuatan rencana keutuhan yang lebih akurat	2	1	2	kecil	PPTK	12 Bulan
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhi kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	spesikasi yang kurang tepat yang tidak sesuai	R 1	cetakan, fotokopi, dan penjiilidan kurang sesuai dengan hasil yang diharapkan	Spek tidak terpenuhi	C	Upaya yang lebih komunikatif	2	1	2	kecil	Komunikasi lebih ditingkatkan	Spek diperjelas dalam komunikasi	2	1	2	kecil	PPTK	12 Bulan
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhi kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	spesikasi yang kurang tepat yang tidak sesuai	R 1	komponen instalasi/penerangan kurang sesuai dengan hasil yang diharapkan	Spek tidak terpenuhi	C	Upaya yang lebih komunikatif	2	1	2	kecil	Komunikasi lebih ditingkatkan	Spek diperjelas dalam komunikasi	2	1	2	kecil	PPTK	12 Bulan

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mendukung kelancaran administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	R 1	Verifikasi tidak dilakukan dengan teliti	terjadi kerugian keuangan negara	C	pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	2	1	2	kecil	pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatannya	singkirkan sebabnya	1	2	2	kecil	PPTK	12 Bulan
11	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak Tercukupinya kebutuhan jamuan makan dan minum dinas	R 1	Penyediaan makanan dan minuman tidak terlaksana secara maksimal	Terhambatnya acara rapat koordinasi, rapat penyuluh dan penerimaan tamu	C	Rencana dan persiapan yang matang	2	1	2	kecil	Pencermatan kebutuhan	singkirkan sebabnya	1	2	2	kecil	PPTK	12 Bulan
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Anggaran tidak mencukupi, peraturan	R 1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tidak terlaksana secara maksimal	Terhambatnya informasi - informasi dari instansi provinsi dan pusat	C	Memaksimalkan rapat melalui virtual meeting	2	1	2	kecil	Komunikasi lebih ditingkatkan	Tingkatkan efektifitas pertemuan mealui virtula meeting	1	2	2	kecil	PPTK	12 Bulan
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Anggaran terpangkas	R 1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah tidak terlaksana secara maksimal	Terhambatnya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	U/C	Memaksimalkan rapat melalui virtual meeting	2	1	2	kecil	Komunikasi lebih ditingkatkan	Tingkatkan efektifitas pertemuan mealui virtula meeting	1	2	2	kecil	PPTK	12 Bulan

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur	Anggaran terpangkas	R 1	Target awal tidak terpenuhi	Terhambatnya Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	U/C	Memaksimalkan aset yang masih dalam kondisi baik	2	1	2	kecil	Peningkatan efektivitas	Peningkatan efektivitas penggunaan barang	1	2	2	kecil	PPTK	12 Bulan
15	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur	Anggaran terpangkas	R 1	Target awal tidak terpenuhi	Terhambatnya sarana dan prasarana aparatur	U/C	Memaksimalkan aset yang masih dalam kondisi baik	2	1	2	kecil	Peningkatan efektivitas	Peningkatan efektivitas penggunaan barang	1	2	2	kecil	PPTK	12 Bulan
16	Pengadaan mebeleur	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur	Koordinasi dengan penyedia jasa kurang berjalan lancar	R 1	Pembelian tidak sesuai spek	Spek tidak terpenuhi	C	Upaya yang lebih komunikatif	2	1	2	kecil	Mengintensifkan kembali koordinasi dengan penyedia jasa	Lebih teliti dalam koordinasi	1	2	2	kecil	PPTK	12 Bulan
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur	Anggaran terpangkas	R 1	Target awal tidak terpenuhi	Terhambatnya perbaikan gedung	U/C	Memaksimalkan aset yang masih dalam kondisi baik	3	3	9	Tinggi	Meminimalisasi kerusakan aset	Memaksimalkan aset yang masih dalam kondisi baik	1	2	2	kecil	PPTK	12 Bulan
18	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah (11 Dokumen)	Kehadiran peserta dan Narasumber Forum PD	R 1	Materi Forum PD tidak terinformasi dan validasi Renja PD kurang khususnya validasi lokasi progam dan kegiatan	Lokasi Program dan Kegiatan pada Renja PD kurang valid	C	Koordinasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan Forum, undangan dan materi disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dan konsultasi melalui pertemuan dan melalui sosial media	Undangan dan materi disampaikan tepat waktu baik ke Peserta ataupun Narasumber	1	2	2	kecil	PPTK	1 Tahun Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kehadiran peserta dan narasumber Rakorpop K	R 2	Tidak adanya solusi pemecahan permasalahan sehingga target kinerja tidak tercapai	Indikator Kinerja PD tidak tercapai	C	Koordinasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan rakorpop K,	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan rakorpop K	Undangan dan materi disampaikan sebelum rapat dan hasil Rakorpop baik hard copy atau file dikirim melalui sosial media kepada Narasumber	1	2	2	kecil	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
			Kehadiran peserta Penyusunan Renja PD	R 3	Materi Renja PD tidak terinformasikan dan Renja PD kurang valid	Renja PD tersusun Kurang Valid	C	Koordinasi jadwal penyusunan Renja PD	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait serta koordinasi internal dengan bidang jadwal penyusunan Renja PD	Penyampaian materi dan hasil Rapat Penyusunan Renja baik hard copy atau file melalui sosial media	1	2	2	kecil	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
			Kehadiran peserta dan Narasumber Kegiatan Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian. Adanya Rasionalisasi anggaran	R 4	Materi Penyusunan Action Plan tidak terinformasikan dan Bahan Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan kurang valid. Kegiatan Penyusunan Action Plan tidak terlaksana	Action Plan Pengembangan Kawasan tidak tersusun	UC/C	Koordinasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan kegiatan,	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik kabupaten, provinsi dan Pusat. dan Koordinasi antar bidang. Pencermatan rasionalisasi anggaran.	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media kegiatan yang sudah dilakukan. Penganggaran tahun berikutnya.	1	2	2	kecil	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kehadiran peserta dan Narasumber Kegiatan Penyusunan Renstra. Adanya rasionalisasi anggaran	R 5	Materi Renja PD tidak terinformasikan dan Resntra PD kurang valid. Kegiatan Penyusunan Renstra tidak terlaksana	Renstra PD tidak tersusun	UC/C	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan kegiatan,	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan kegiatan, dan koordinasi dengan bidang - bidang	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan penganggaran tahun berikutnya.	1	2	2	kecil	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
			Kehadiran Peserta Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA,	R 6	Aturan yang berlaku dan baru dalam penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA tidak tersampaikan	RKA/RKAP dan DPA/DPPA tidak sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu	C	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan RKA/ RKAP dan DPA/ DPPA,	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan RKA/ RKAP dan DPA/ DPPA dengan instansi terkait, dan koordinasi dengan bidang lebih intensif	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
			Kehadiran Peserta Penyusunan LKPJ/LPPD,	R 7	Bahan LKPJ/ LPPD tidak terkumpul secara lengkap	Penyusunan LKPJ/ LPPD tidak valid dan tepat waktu	C	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan LKPJ/ LPPD dengan instansi terkait	2	3	6	Moderat	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan LKPJ/ LPPD dengan instansi terkait, koordinasi dengan bidang lebih intensif	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kehadiran Peserta Penyusunan LKjIP.	R 8	Bahan LKjIP kurang lengkap dan terlambat terselesaikan/ tidak sesuai jadwal	LKjIP tersusun tidak valid dan tepat waktu	C	Koordinasi jadwal Penyusunan LKjIP, dan penyampaian materi baik hard copy atau file melalui sosial media	2	3	6	Moderat	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan LKjIP dengan instansi terkait , dan koordinasi dengan bidang - bidang secara intensif	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
			Kehadiran Peserta dan Narasumber Penyusunan SPIP	R 9	Informasi terbaru tentang SPIP tidak tersampaikan sehingga kelengkapan bahan SPIP tidak tersedia	SPIP belum tersusun sesuai aturan yang berlaku dan tidak lengkap	C	Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait Penyusunan SPIP,	2	3	6	Moderat	Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait jadwal Penyusunan SPIP, dan koordinasi dengan bidang - bidang	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
			Kehadiran Peserta dan Narasumber Penyusunan SOP	R 10	Informasi terbaru tentang SOP tidak tersampaikan sehingga kelengkapan bahan SOP tidak tersedia	SOP belum tersusun sesuai aturan yang berlaku dan tidak lengkap	C	Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait Penyusunan SOP, dan penyampaian materi baik hard copy atau file melalui sosial media	2	3	6	Moderat	Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait Penyusunan SOP, dan koordinasi dengan bidang - bidang	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah	PPTK	1 Tahun Anggaran
			Data Monitoring dan Evaluasi tidak lengkap	R 11	Bahan Analisa data tidak lengkap	Analisa data untuk perencanaan tahun berikutnya tidak lengkap	C	Koordinasi dengan bidang - bidang dan petugas di lapangan,	2	3	6	Moderat	Koordinasi dengan bidang - bidang dan petugas di lapangan,	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah	PPTK	1 Tahun Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
19	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya Data Base Perangkat Daerah (1 Dokumen)	Tidak terdapat supervisi dari kepala seksi pendataan, Data yang tidak sinkron antar bidang, kehilangan data/ data tidak ada atau kurang. Data berasal dari sumber yang berbeda sehingga data tidak valid dan tidak dapat dianalisa, Proses berulang untuk setiap jenis laporan yang sama sehingga tidak efisien, Lambatnya arus informasi pelaporan, serta rasionalisasi anggaran	R 1	Pengelolaan data dan informasi statistik pertanian belum efektif dan efisien	Data dan informasi yang belum A3 (Accurate, Accessible, dan Accountable)	UC/C	Report data harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan. Pelaporan melalui aplikasi data statistik pertanian	4	4	16	sangat tinggi	Sinkronisasi data statistik pertanian dan pelaporan data statistik pertanian secara berkala melalui aplikasi data statistik pertanian	Ceklis secara berkala, pengembangan aplikasi, penganggaran pengumpulan data	2	4	8	sedang	PPTK	1 Tahun Anggaran
20	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlatihnya Petani dalam hal pembuatan pupuk organik	Anggaran terpengkas	R1	Pengurangan jumlah petani yang menerima pelatihan pembuatan pupuk organik	Pelatihan pembuatan pupuk organik tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan minimnya anggaran	C	Melakukan koordinasi dengan Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan dari Poktan yang menerima pelatihan pembuatan pupuk organik	2	3	6	Moderat	Peningkatan koordinasi dan komunikasi petugas dengan kelompok tani di wilayahnya	Peningkatan kunjungan lapangan PPL ke petani untuk menyerap aspirasi terkait kegiatan pertanian sebagai dasar penyusunan program Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	2	2	4	rendah	PPTK	1 Tahun Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
21	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan dan program tingkat kabupaten	Anggaran terpengkas	R1	pengurangan jumlah peserta pertemuan pembahasan penyusunan programa tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten	Pembahasan penyusunan programa penyuluhan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena minimnya peserta	C	Melakukan koordinasi dengan BPP terkait pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan	2	3	6	Moderat	Peningkatan koordinasi dan komunikasi petugas dengan kelompok tani di wilayahnya	Peningkatan kunjungan lapangan PPL ke petani untuk menyerap aspirasi terkait kegiatan pertanian sebagai dasar penyusunan programa penyuluhan	2	2	4	rendah	PPTK	1 Tahun Anggaran
		Terlaksananya pembinaan kelompok penerima PMUK, P4K, dan PUAP	Anggaran terpengkas	R1	pengurangan kegiatan pembinaan kelompok karena ketidakcukupan anggaran	Pembinaan kelompok tidak dapat dilaksanakan	C	Koordinasi dengan BPP untuk melakukan pendampingan kelompok	3	3	9	Moderat	Pembinaan dan pendampingan kelompok melalui anjangsana penyuluh	Kunjungan (anjangsana) ke kelompok untuk melakukan pembinaan dan pendampingan	2	2	4	rendah	PPTK	1 Tahun Anggaran
22	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya kegiatan IPDMIP	Anggaran terpengkas	R1	Pengurangan kegiatan IPDMIP karena ketidakcukupan anggaran	Kegiatan IPDMIP tidak dapat dilaksanakan seluruhnya	C	Melaksanakan seoptimal mungkin kegiatan yang dapat dilaksanakan	3	3	9	Moderat	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan IPDMIP yang dapat dilaksanakan	Penigkatan kualitas materi penyuluhan dan peningkatan dinamika kelompok	2	2	4	rendah	PPTK	1 Tahun Anggaran
		Terlaksananya kegiatan pembinaan peningkatan kualitas lembaga tani	Anggaran terpengkas	R 2	pengurangan kegiatan pembinaan kelompok karena ketidakcukupan anggaran	Pembinaan kelompok tidak dapat dilaksanakan	C	Koordinasi dengan BPP untuk melakukan pendampingan kelompok	3	3	9	Moderat	Pembinaan dan pendampingan kelompok melalui anjangsana penyuluh	Kunjungan (anjangsana) ke kelompok untuk melakukan pembinaan dan pendampingan	2	2	4	rendah	PPTK	1 Tahun Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
23	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya bantuan hibah bibit ternak kambing pada Desa Mandiri Pangan dalam rangka penanganan daerah rawan pangan	Tidak terlaksananya sosialisasi kepada calon penerima hibah	R1	Informasi yang harus diterima oleh calon penerima hibah tidak tersampaikan dengan baik	Kegagalan dalam pengelolaan bibit ternak kambing	C	Sosialisasi dengan mengundang calon penerima hibah bibit ternak kambing serta memberikan pelatihan pelatihan terkait pengelolaan ternak kambing	3	3	9	Moderat	Pembinaan secara terus menerus	Kunjungan Langsung Ke Kelompok Penerimaanya	2	2	4	Sangat rendah	PPTK	1 Tahun Anggaran
24	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Anggaran terpangkas	R1	Ketidakcukupan anggaran	Tidak terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	UC	Koordinasi dengan BPKAD	3	3	9	Moderat							Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
25	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian mendukung peningkatan ketahanan pangan	Anggaran yang terpangkas	R1	Tidak ada anggaran untuk pengadaan Alsintan	pengadaan alsintan tidak dapat dilaksanakan	C	sudah dilakukan koordinasi dengan DPPKAD	3	3	9	Moderat	Menjalankan dengan terbatasnya sisa anggaran dengan Sosialisasi dan pelatihan/ pembinaan secara intensif	koordinasi dengan penyuluh pertanian di BPP kecamatan	2	2	4	Rendah	PPTK	1 tahun Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
26	Pengembangan cadangan pangan daerah	Persiapan Pelaksanaan pengembangan cadangan pangan daerah	Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan tidak memperhatikan kondisi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat dan jumlah kebutuhan	R 1	Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan tidak sesuai dengan kebutuhan		C	Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan dengan mempertimbangkan potensi produksi, prioritas sasaran, kondisi konsumsi, periode waktu kebutuhan pangan, resiko penurunan kualitas	2	2	4	sangat rendah	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan						PPTK	
			Belum adanya dasar pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan	R 2	Pemanfaatan cadangan pangan tidak tepat sasaran		C	Mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012 ttg pangan ttg pemanfaatan cadangan pangan yang harus ditindaklanjuti dengan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota ttg pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	3	3	9	Tinggi	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan						PPTK	
		Pengadaan cadangan pangan	Rekanan tidak mempunyai barang sesuai dengan standar	R 3	Ketidaksesuaian dengan spesifikasi		UC	Pemeriksaan pekerjaan	3	3	9	Tinggi	Penunjukan tim PPHP yang Profesional						PPTK	

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyedia barang/jasa tidak disiplin	R 4	Keterlambatan Penyerahan Pekerjaan		UC	Membuat Sanksi Keterlambatan	3	3	9	Tinggi	Monitoring kemajuan pekerjaan						PPTK	
		Penyimpanan Cadangan Pangan	Cadangan pangan berupa beras dan gabah mempunyai umur teknis pendek, penurunan kualitas gudang cadangan pangan	R 5	Penurunan kualitas cadangan pangan		C	Pemeliharaan	4	3	12	Tinggi	Peremajaan cadangan pangan						PPTK	
		Penyaluran Cadangan Pangan	Laporan kejadian bencana tidak akurat	R 6	Ketidaktepatan waktu/jumlah penyaluran		UC	Pemberdayaan tim SKPG	3	3	9	Tinggi	Rapat koordinasi tim SKPG secara periodik						PPTK	
		Pelaporan	Pencatatan keluar masuk cadangan pangan tidak dilakukan secara rutin	R 7	Laporan stok cadangan pangan tidak akurat		C	Penyaluran bantuan cadangan pangan dilengkapi berita acara penyerahan bantuan	3	3	9	Tinggi	Pemeriksaan stok dengan membandingkan dokumen pengeluaran dengan stok di gudang secara periodik						PPTK	
27	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Kelompok Tani/Gapoktan di Kabupaten Kebumen	Data usulan CPCL yaitu kelompok pelaksana kegiatan kurang update sehingga tidak sesuai kondisi di lapangan	R1	Usulan CPCL kegiatan kurang valid	Penyusunan SK Penetapan kelompok pelaksana kegiatan menjadi terhambat	C	Verifikasi usulan CPCL dan konfirmasi kembali ke petugas penyuluh di kecamatan terkait kesesuaian usulan dengan kondisi kelompok	2	4	8	Moderat	Verifikasi usulan CPCL oleh petugas penyuluh di tingkat kecamatan	Usulan CPCL dari kecamatan dilengkapi hardcopy yang ditandatangani petugas di tingkat kecamatan	1	2	2	Sangat rendah	PPTK	1 Tahun

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Banyaknya kelompok sasaran kegiatan	R2	Semakin beragam jenis komoditas maupun varietas yang diusulkan sesuai masa tanamnya	Pengadaan barang lebih kompleks permasalahannya baik paket jumlah maupun terkait waktu pengadaan barang	C	Menginventarisir dan mengelompokkan jenis komoditas maupun varietas yang diusulkan	4	4	16	Ekstrem	Penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas	Koordinasi dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan terkait komoditas dan varietas alternatif yang mungkin dapat diaplikasikan pada kelompok pelaksana kegiatan	2	4	8	Moderat	PPK	1 Tahun
			Kondisi iklim terkait masa tanam dan pengadaan barang	R3	Ketidaksesuaian kondisi iklim dengan penentuan jenis dan varietas	Produksi kurang optimal	C	Menginventarisir data iklim terutama curah hujan terkait faktor utama dalam penyediaan air irigasi	2	8	16	Ektrem	Mengupdate perkembangan data iklim dan disertai mencari data potensi sumber air alternatif	Menganalisis data iklim dari BMKG serta berkoordinasi dengan instansi terkait irigasi serta dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan untuk memperoleh data sumber air alternatif yang dapat diaplikasikan oleh kelompok pelaksana kegiatan	1	3	3	Rendah	Kepala Dinas	1 Tahun

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
28	Pengembangan diversifikasi tanaman	Kelompok Tani/Gapoktan di Kabupaten Kebumen	Kelompok sasaran terlalu banyak	R1	Semakin beragam jenis komoditas yang diusulkan	Pengadaan barang lebih kompleks permasalahannya	C	Menginventarisir dan mengelompokkan jenis komoditas maupun varietas yang diusulkan	4	4	16	Tinggi	Penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas	Koordinasi dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan terkait komoditas dan varietas alternatif yang mungkin dapat diterima oleh kelompok pelaksana kegiatan	2	4	8	Sedang	PPK	1 Tahun
			Musim hujan yang mundur	R2	Jadwal tanam mundur	Kurang maksimal waktu tanamnya	C	Persiapan lubang tanam sehingga begitu hujan langsung ditanam	3	3	9	Moderat	Mengupdate perkembangan data iklim dan koordinasi dengan BMKG	Menganalisis data iklim dari BMKG serta berkoordinasi dengan penyuluh agar kelompok tani memelihara tanaman terlebih dahulu sebelum ditanam menunggu hujan turun	1	3	3	Rendah	PPK	1 tahun
29	Pengembangan lumbung pangan desa	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	Anggaran yang terpakas	R1	Tidak ada anggaran pembangunan	Pembangunan tidak dapat dilaksanakan	UC	Koordinasi dengan BPKAD	4	4	16	Sangat Tinggi							Kepala Dinas	1 Tahun

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
30	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Kelompok Tani/Gapoktan di Kabupaten Kebumen	Kelompok/gapoktan yang diusulkan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang di butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	R1	Usulan CPCL kegiatan kurang valid	Penyusunan SK Penetapan kelompok pelaksana kegiatan menjadi terhambat	C	Penyusunan form verifikasi yang lengkap dan jelas, Verifikasi usulan CPCL secara bertahap mulai dari petugas penyuluh lapangan hingga petugas verifikasi kabupaten	2	4	8	Moderat	Verifikasi usulan CPCL oleh petugas penyuluh di tingkat kecamatan	Usulan CPCL dari kecamatan dilengkapi form hasil verifikasi yang ditandatangani petugas penyuluh di kecamatan	1	2	2	Sangat rendah	PPTK	1 Tahun
			Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	R 2	Anggaran terpengkas	Pengadaan tidak terlaksana sehingga kegiatan kelompok juga tidak terlaksana	UC	Penyusunan Kembali Rencana Pelaksanaan Kegiatan	3	3	9	Tinggi	Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang dirasionalisasikan	Pelaksanaan kegiatan hasil rasionalisasi	3	4	12	Tinggi	PPTK	1 tahun anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
31	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Kelompok Tani/Gapoktan di Kabupaten Kebumen	belum adanya kebun induk khususnya GEK, serta kurangnya pengetahuan petani tentang pengembangan perbenihan di Kabupaten Kebumen	R 1	minimnya jumlah benih untuk memenuhi kebutuhan benih dalam kegiatan perbenihan	kurangnya benih yg dibutuhkan, benih bukan dari Pohon Induk terpilih (PIT), kesulitan utk pengajuan dalam setifikasi atau pelabelan dari BPSB Prov. Jateng		melakukan pendataan pohon kelapa milik petani utk dijadikan Pohon Induk Terpilih (PIT) Kelapa, penomoran dan GPS pada pohon kelapa, melakukan pemeliharaan dengan pemupukan dan pengendalian OPT, membuat demplot GEK kerja sama dengan Balitpalma Manado	4	3	12	Tinggi	kerjasama dengan Balai benih dan Balai Proteksi dalam pengadaan dan perlindungan perbenihan	pendampingan dan pembinaan kelompok tani dalam melakukan pengembangan perbenihan	2	4	8	sedang	PPTK	1 tahun anggaran
32	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Pasar tradisional dan pasar modern/ swalayan di wilayah Kabupaten Kebumen	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi		Mutu dan keamanan pangan tidak diperhatikan	Masih adanya produk pangan yang ditemukan masih mengandung bahan yang berbahaya	C	Pemantauan dan pengambilan sampel secara berkala untuk di uji baik pangan segar maupun pangan olahan di pasar tradisional maupun pasar modern/ swalayan di wilayah Kabupaten Kebumen	3	3	9	Tinggi	Pengawasan/ pemantauan dilakukan secara periodik	Koordinasi dan pemantauan bersama Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)	1	3	3	rendah	PPTK	1 Tahun anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Pelaku usaha/ pedagang	Rendahnya wawasan masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan	R 1	Makanan yang dikonsumsi tidak aman	Menurunnya imunitas tubuh	C	Sosialisasi, pelatihan dan pembinaan	3	3	9	Tinggi	Sosialisasi dan pelatihan/ pembinaan secara terus menerus	Koordinasi dengan penyuluh tingkat kecamatan	2	4	8	sedang	PPTK	1 Tahun anggaran
33	Pengembangan Sentra Tanaman Hortikultura dan Buah -buahan	Kelompok Tani/Gapoktan di Kabupaten Kebumen	Kelompok sasaran terlalu banyak	R1	Semakin beragam jenis komoditas yang diusulkan	Pengadaan barang lebih kompleks permasalahannya	C	Menginventarisir dan mengelompokkan jenis komoditas maupun varietas yang diusulkan	4	4	16	Tinggi	Penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas	Koordinasi dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan terkait komoditas dan varietas alternatif yang mungkin dapat diterima oleh kelompok pelaksana kegiatan	2	4	8	sedang	PPK	1 Tahun
			Musim hujan yang mundur	R2	Jadwal tanam mundur	Kurang maksimal waktu tanamnya	C	Persiapan lubang tanam sehingga begitu hujan langsung ditanam	3	3	9	Moderat	Mengupdate perkembangan data iklim dan koordinasi dengan BMKG	Menganalisis data iklim dari BMKG serta berkoordinasi dengan penyuluh agar kelompok tani memelihara tanaman terlebih dahulu sebelum ditanam menunggu hujan turun	1	3	3	Rendah	PPK	1 tahun

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			masih rendahnya ilmu pengetahuan dan ketrampilan petani tentang budidaya tanaman yang baik	R3	budidaya tanaman belum sesuai dengan petunjuk teknis	mengurangi hasil produksi dan produktivitas tanamanhortikultura	C	dilaksanakan SL GAP hortikultura secara intensif di tingkat kelompok tani/ Gapoktan	3	3	9	Tinggi	Mengadakan SL GAP hortikultura secara terus menerus	Koordinasi dengan petugas penyuluh dan POPT sehingga SL GAP hortikultura dapat berjalan terus	2	4	8	sedang	PPK	1 tahun
34	Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan	Kelompok percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yaitu TP PKK Desa di wilayah Kabupaten Kebumen	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	R 1	Anggaran terpankas	Pengadaan tidak terlaksana sehingga kegiatan kelompok juga tidak terlaksana	UC													
			Kurangnya pemahaman kelompok terhadap kegiatan P2KP	R 2	Tingkat keberlanjutan kegiatan di tingkat kelompok kecil	Kegiatan kelompok tidak berjalan seperti yang diharapkan	C	Sosialisasi, pelatihan/ pembinaan	3	3	9	Tinggi	Sosialisasi dan pelatihan/ pembinaan secara terus menerus	koordinasi dengan penyuluh pertanian di BPP kecamatan	2	4	8	sedang	PPTK	1 Tahun anggaran
		Kelompok wanita/ PKK	Rendahnya minat masyarakat terhadap konsumsi pangan lokal	R 3	Masyarakat masih menganggap pangan lokal sebagai pangan yang berkualitas rendah	Bahan pangan berbasis sumber daya lokal tidak dimanfaatkan dengan baik	C	Sosialisasi, pelatihan/ pembinaan dan promosi (lomba cipta menu berbasis sumber daya lokal)	3	3	9	Tinggi	Sosialisasi dan pelatihan/ pembinaan dan promosi secara terus menerus	koordinasi dengan penyuluh pertanian di BPP kecamatan	2	4	8	sedang	PPTK	1 Tahun anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
35	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan		Kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta penggunaan peralatan dan mesin penanganan pasca panen dan pengolahan terhadap pentingnya mutu dan keamanan pangan	R 1	dalam melakukan pengolahan pascapanen Petani produsen masih menggunakan peralatan dan mesin penanganan pasca panen yang masih sederhana serta kurangnya kemampuan / pengetahuan pengolahan hasil kurang memperhatikan kualitas dan keamanan pangan	Pangan dan bahan pangan asal hortikultura dan perkebunan belum memenuhi kebutuhan konsumen sesuai kualitas dan kuantitas terbatas	C	Sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis peralatan dan mesin penanganan pasca panen serta pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan	4	3	12	Tinggi	Sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus	koordinasi dengan penyuluh pertanian di BPP kecamatan	2	4	8	sedang	PPTK	1 tahun
36	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Produk Unggulan Kabupaten kebumen	Rasionalisasi Anggaran	R 1	Tidak Terlaksananya Beberapa Kegiatan Promosi Luar dan Dalam Daerah	Pengadaan tidak terlaksana bantuan untuk stimulan tidak dapat diserahkan kepada kelompok penerima dan kegiatan di kelompok tidak dapat dilaksanakan		Penyusunan Kembali Rencana Pelaksanaan Kegiatan Promosi	2	3	6	rendah	Pembatalan atau memilih kegiatan promosi yang penting	Memilih promosi yang dilaksanakan di triwulan III/ IV	2	2	4	rendah	PPTK	1 tahun anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
37	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	kelompok tani perkebunan pada sentra komoditas unggulan tanaman perkebunan	terbatasnya jumlah obat obatan	R 1	kurangnya jumlah obat obatan yang dibutuhkan petani	kurangnya pengendalian OPT tanaman perkebunan di lapang karena keterbatasan jumlah obat obatan		stockis obat obatan	2	3	6	rendah	memberikan obat obatan kepada petani untuk kegiatan pengendalian OPT tan Bun	melakukan koordinasi dengan POPT dalam mengaplikasikan pplikasi obat obatan untuk pengendalian tanaman perkebunan	2	2	4	rendah	PPTK	1 tahun anggaran
38	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) di tingkat kelompok tani/Gapoktan di Kabupaten Kebumen	masih rendahnya ilmu pengetahuan dan ketrampilan petani tentang pengendalian OPT	R 1	pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman belum maksimal	mengurangi hasil produksi dan produktivitas tanaman pangan		dilaksanakan SLPHT secara intensif di tingkat kelompok tani/ Gapoktan	3	3	6	Rendah	meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani tentang pengendalian serangan OPT	pelatihan dan pendampingan SLPHT di kelompok secara oleh POPT	2	2	4	rendah	PPTK	1 tahun
39	Pembangunan / Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Pembangunan Gedung BPP dan Sarana Pendukungnya	Rasionalisasi Anggaran	R 1	Target tidak terpenuhi karena Bangunan Tidak Dapat Dilaksanakan	Gedung BPP tidak diperbaiki dan Prasarana/Sarana tidak terpenuhi	C	pemeliharaan gedung	3	3	9	Tinggi	Meningkatkan pemeliharaan gedung	melakukan perawatan gedung	3	3	9	Tinggi	PPK	1 Tahun
40	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)	Data kebutuhan pupuk bersubsidi yang tertuang dalam RDKK belum sesuai dengan kondisi di lapangan	R 1	Belum efektifnya penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani	Pemberian pupuk bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran, jumlah, jenis, waktu, dan mutu	C	melaksanakan pendampingan dan pertemuan penyusunan RDKK dari tingkat Desa dan Kecamatan	3	3	9	Tinggi	Melaksanakan updating data kebutuhan pupuk bersubsidi secara berkala	melakukan koordinasi dengan petugas RDKK di tingkat Kecamatan					PPTK	1 tahun

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Tersedianya Dokumen Data Alsintan	Data alsintan belum terdokumentasi dengan baik	R 2	Kesulitan untuk mengetahui jenis maupun jumlah alsintan yang dibutuhkan petani	Sebaran alsintan tidak sesuai dengan kebutuhan petani	C	Mengupdate data alsintan untuk memperkirakan kebutuhan alsintan	3	3	9	Moderat	Menyusun data pemanfaatan alsintan untuk mengetahui sebaran, jenis dan kondisi alsintan	Melakukan koordinasi dengan PPL Kecamatan untuk melakukan pendataan					PPTK	1 tahun
		Terlaksananya Pengadaan Traktor Roda Dua, Pompa Air dan Alat Pra Panen Mendukung Corporate Farming	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	R 3	Tidak semua pengadaan alsintan dilaksanakan	Tidak terpenuhinya target pengadaan alsintan di tahun 2020	UC	Melaksanakan pengadaan alsintan sesuai dengan yang tertuang dalam RKAP	3	3	9	Moderat							PPTK	1 tahun
41	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya pembinaan penggunaan benih bersertifikat dan calon kelompok penangkar benih	masih rendahnya pengetahuan dan informasi penggunaan benih bersertifikat	R 1	belum maksimalnya penggunaan dan ketersediaan benih bersertifikat	kurang maksimalnya hasil produksi dan provitan tanaman pangan		pembinaan penggunaan benih bersertifikat dan demfarm penggunaan benih bersertifikat	3	3	6	rendah	meningkatkan pengetahuan, informasi dan kemampuan petani tentang benih bersertifikat	melakukan sosialisasi dan pembinaan petugas BPSB	2	4	6	sedang	PPTK	1 tahun

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
42	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Sadang, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Karangasambung, Kecamatan Prembun, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Alian	Perbedaan Waktu Tanam Di Beberapa Kecamatan, Kemungkinan Terjadi Rasionalisasi Anggaran	R 1	Perbedaan Kualitas Dari Tembakau Kering Hasil Demplot, Pengaturan Lagi Kegiatan	Kurang Maksimalnya Kualitas Tembakau Kering		Penggunaan Bibit Tembakau Polibag, Mengusahakan agar sarana prasarana untuk demplot tembakau bisa tepat waktu	4	2	8	Sedang	Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil rasionalisasi anggaran; Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan hasil rasionalisasi	2	4	8	Sedang	PPTK	1 tahun anggaran
43	Pendataan masalah peternakan	Masyarakat/ Petani Ternak / KTT di Kabupaten Kebumen	Rasionalisasi Anggaran	R 1	Uji lab tdk bisa dilaksanakan kecuali Antraks	Kualitas bibit sapi PO Kebumen tdk terdeteksi penyakitnya, termasuk penganjuran LsPro utk sapi bibit tertunda	C	Pengkaktifan kader keswan untuk pemantauan dan pelaporan kasus klinis	4	4	16	Tinggi	Peternak dimohon swadaya dalam pemeriksaan lab sapi bibit	Menginformasikan kpd peternak untuk swadaya pemeriksaan lab sapi bibit	4	4	16	Tinggi	PPTK	1 tahun anggaran
				R 2	Jasa pelayanan kesehatan hewan untuk layanan Puskesmaswaling dikurangi	81% masyarakat / petani ternak / KTT tidak terlayani	c	Pekaktifan kader keswan untuk pelaporan ke puskesmasw	3	3	9	Sedang	Peternak dimohon swadaya dalam pembiayaan jasa pelayanan kesehatan hewan	Memberikan KIE kepada peternak agar swadaya dalam pembiayaan layanan kesehatan hewan terutama kasus yang penting	3	3	9	Sedang	PPTK	1 tahun anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
44	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Masyarakat / Petani Ternak di Kabupaten Kebumen	Rasionalisasi Anggaran	R 1	Belanja obat-obatan ternak ditiadakan	Hanya memanfaatkan stok opname obat yang ada	C	Optimalisasi pelayanan pasif dan semi aktif	4	3	12	Tinggi	Hanya pelayanan pasif servis	Pemanfaatan obat seoptimal mungkin	4	3	12	Tinggi	PPTK	1 Tahun Anggaran
				R 2	Semua kegiatan workshop ditiadakan	Transfer ilmu kpd petugas dan peternak terbatas	C	Peningkatan komunikasi dengan Internet	4	3	12	Tinggi	Jalin komunikasi lebih intens dengan petugas agar meneruskan ke kader keswan	Aktif berkomunikasi lewat internet	4	3	12	Tinggi	PPTK	1 Tahun Anggaran
45	Fasilitasi Pendukung Penanganan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavert)	Masyarakat / Petani Ternak di Kabupaten Kebumen	Rasionalisasi Anggaran	R 1	Tidak terbangunnya Rumah Potong Hewan	RPH Gombang blm sesuai dgn standar	C	Memaksimalkan fungsi dengan kondisi seadanya	4	3	12	Tinggi	Memastikan jagal tetap mau memotong di RPH	Perawatan lebih intensif terhadap sarana prasarana	4	3	12	Tinggi	PPTK	1 Tahun anggaran
				R 2	Tidak tersusunnya DED Perlengkapan Puskesmas	Puskesmas Mirit, Klirong belum jadi mengembangkan fasilitas, Puskesmas Alian dan Buayan blum ada plafon dan keramik	C	Memaksimalkan fungsi dengan kondisi seadanya	4	3	12	Tinggi	Memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai fungsinya	Perawatan lebih intensif terhadap sarana prasarana yang ada	4	3	12	Tinggi	PPTK	1 Tahun anggaran
46	Pembibitan dan perawatan ternak	Kelompok Tani Ternak, peternak di wilayah Kabupaten Kebumen	Rasionalisasi Anggaran	R 1	Program penanggulangan Kemiskinan tidak tercapai	Kegiatan terutama pengadaan hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak dilaksanakan	UC	Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil rasionalisasi anggaran; Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan	3	4	12	Tinggi	Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil rasionalisasi anggaran; Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan hasil rasionalisasi	3	4	12	Tinggi	PPTK	1 tahun anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
47	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	KTT, KWTT dan Peternak di Kabupaten Kebumen	Rasionalisasi anggaran	R 1	Pelaksanaan pembinaan/pelatihan yang belum dilaksanakan dibatalkan	Kegiatan tidak dilaksanakan	UC	Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil rasionalisasi anggaran; Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Tinggi	Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil rasionalisasi anggaran; Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan		3	3	9	Tinggi	PPTK	1 tahun anggaran
48	Pengembangan agribisnis peternakan	Kelompok Tani Ternak penerima manfaat	Rasionalisasi Anggaran	R 1	Program penanggulangan kemiskinan tidak tercapai	Kegiatan terutama pengadaan hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak dilaksanakan	UC	Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil rasionalisasi anggaran; Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan	3	4	12	Tinggi	Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil rasionalisasi anggaran; Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan hasil rasionalisasi	3	4	12	Tinggi	PPTK	1 tahun anggaran
49	Fasilitasi Pendataan Peternakan	Kelompok Tani Ternak dan Peternak di Kabupaten Kebumen	Rasionalisasi anggaran	R 1	Pendataan kartu ternak dibatalkan	Kegiatan tidak dilaksanakan, target pendataan kartu ternak tidak tercapai	UC	Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil rasionalisasi anggaran; Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan	3	4	12	Tinggi	Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil rasionalisasi anggaran; Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan		3	4	12	Tinggi	PPTK	1 tahun anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan verifikasi dan validasi KTT tidak tepat waktu.	R 2	Penundaan kegiatan verifikasi dan validasi KTT.	Kegiatan verifikasi dan validasi KTT tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Target verifikasi kelompok tidak maksimal	UC		4	3	12	Tinggi	Menata ulang jadwal daftar kecamatan yang belum terverifikasi						PPTK	1 tahun anggaran
50	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Kelompok Tani Ternak dan Kelompok Wanita Tani Ternak di Kabupaten Kebumen	Rasionalisasi anggaran	R 1	Pelaksanaan Soropadan Agro Expo, Promosi/Karnaval Pembangunan dan Kebumen Expo dibatalkan; Anggaran pendukung pelaksanaan kegiatan di rasionalisasi	Kegiatan tidak ada yang dilaksanakan	UC	Melaksanakan hasil rasionalisasi anggaran	4	4	16	Tinggi							PPTK	1 tahun anggaran
51	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan	Rumah Potong Hewan di Kabupaten Kebumen	Rasionalisasi Anggaran	R 1	Tidak jadi pemeliharaan bangunan dan lantai pemotongan serta pemeliharaan sumber air	Tidak ada perbaikan Sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan sehingga tetap kurang memadai	C	Memaksimalkan fungsi yang sudah ada	4	2	8	Sedang	Memanfaatkan fasilitas yang ada sebaik mungkin	Perawatan lebih intensif sarana prasarana yang ada	4	2	8	Sedang	PPTK	1 Tahun anggaran
52	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Kelompok Tani dan Gapoktan di Kabupaten Kebumen	Rasionalisasi anggaran	R 1	Kegiatan Jitir , Jides ,Dam Parit ,Jiat tidak dilaksanakan	Target tidak dapat terpenuhi	C	Dilaksanakan Monitoring setiap perkembangan Fisik		2	6	Sedang	Evaluasi Pelaksanaan	Koordinasi dengan penyuluh di BPP	3	2	6	Sedang	PPK	1 Tahun Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	SASARAN KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
53	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Irigasi Pertanian	Gapoktan dan Kelompok Tani untuk melaksanakan kegiatan Swakelola Padat Karya	Koordinasi dengan ketua gapoktan kurang bisa maksimal karena keterbatasan Waktu	R 1	Kegiatan Dam Parit, JIAT	Akibat adanya Corona pelaksanaan fisik menjadi terlambat	C	Dilaksanakan Monitoring perkembangan Fisik	3	2	6	Sedang	Evaluasi Pelaksanaan	Koordinasi dengan Gapoktan /Poktan dalam Pelaksanaan	3	2	6	Sedang	PPK	1 Tahun

Kebumen, 2 Maret 2020
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H.TRI HARYONO
NIP: 19620111 198603 1 018